



# **LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2016**



**PENGADILAN NEGERI BLORA**

**Jl. Raya Blora – Cepu Km. 5 Blora**

**Telp : (0296) 531048**

**Faxs : (0296) 531048**

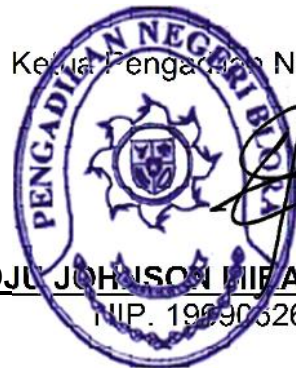
# KATA PENGANTAR

Pengadilan Negeri Blora Kelas II sebagai salah satu Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai wilayah hukum Kabupaten Blora yang meliputi 15 (lima belas) Kecamatan , pada tahun 2016 cukup banyak kemajuan yang dicapai baik fisik maupun non fisik. Antara lain telah mendapatkan Akreditasi A (Exselent) dan mendapatkan ISO 900.2015.

Laporan tahunan ini akan menggambarkan kondisi Peradilan Negeri Blora Kelas II termasuk didalamnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan yang telah dilaksanakan selama tahun 2016, disamping itu didalamnya juga tergambar pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai pendukung kinerja Pengadilan Negeri Blora Kelas II.

Laporan tahunan ini sebagai rangkuman dari seluruh kegiatan kinerja Pengadilan Negeri Blora. Walaupun dengan keterbatasan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Blora namun atas kerja sama yang baik dari semua pihak, Laporan Tahunan ini dapat terselesaikan.

Semoga laporan tahunan ini dapat memberi informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Blora.



Ketua Pengadilan Negeri Blora Kelas II

**DJU JOHNSON MIFA MANGNGI, SH.,MH**

NIP. 196906261993031003

# DAFTAR ISI

Pengantar .....	i
Daftar isi .....	ii
Bab I      Pendahuluan .....	1-2
Bab II     Struktur Organisasi (Tupoksi) .....	3
A.     Standard Operating Procedure (SOP) .....	3
1.   Eselon III .....	5
2.   Eselon IV .....	5
3.   Fungsional .....	8
4.   Panitera Muda .....	
5.   Panitera Pengganti .....	
6.   Jurusita .....	
7.   Staf .....	11
B.     Kinerja/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) .....	9
1.   Eselon III .....	10
2.   Eselon IV .....	11
3.   Fungsional .....	11
4.   Panitera Muda .....	
5.   Panitera Pengganti .....	
6.   Jurusita .....	
7.   Staf .....	11
Bab III   Pembinaan dan Pengelolaan.....	11
A.     Sumber Daya Manusia.....	11
1.   Mutasi .....	13
2.   Promosi.....	14
3.   Pensiun .....	14

	B. Keadaan Perkara .....	14
	C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .....	20
	D. Dukungan Teknologi Informasi .....	20
	E. Pengelolaan Keuangan .....	23
	F. Regulasi Tahun 2016 .....	25
Bab IV	Pengawasan .....	26
	A. Internal	
	B. Evaluasi	
Bab V	Kesimpulan dan Rekomendasi .....	28

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Blora Kelas II sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung tidak akan terlepas dari kebijakan yang berasal dari Pusat. Diantara kebijakan-kebijakan umum tersebut adalah bertujuan meneruskan kebijakan pusat dalam pembenahan struktur hukum melalui pengarahannya kelembagaan, memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai upaya pembaharuan materi hukum nasional. Selain itu juga juga mendukung arahan-arahan pembaruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Karena itulah penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negative terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya aparat keadilan dituntut agar bekerja secara professional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat, maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara Hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai hak asasi manusia serta terwujudnya lembaga perdilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum disetiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Dalam Tahun 2016 ini Pengadilan Negeri Blora Kelas II sebagai badan peradilan tingkat pertama akan mengacu pada visi dan misi yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung RI :

### **VISI PENGADILAN NEGERI BLORA KELAS II.**

**“ Terwujudnya PENGADILAN NEGERI BLORA KELAS II Yang Agung “**

Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi Pengadilan Negeri Blora Kelas II, harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita dan citra yang diinginkan Pengadilan Negeri Blora Kelas II.

### **MISI PENGADILAN NEGERI BLORA KELAS II**

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Blora Kelas II.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Blora Kelas II.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Trasparansi di Pengadilan Negeri Blora Kelas II

Usaha terus menerus dari seluruh aparat Pengadilan Negeri Blora dalam kurun waktu setahun telah berhasil menjabarkan visi dan misinya yang lebih operasional sesuai dengan amanat Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung 2010 – 2035. Penjabaran tersebut tergambar dari kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan langsung oleh Pengadilan Tinggi Semarang ataupun bersama dengan seluruh stake holder yang telah menghasilkan petunjuk-petunjuk teknis nan praktis yang memudahkan Pengadilan tingkat pertama dalam menerjemahkan visi dan misi dalam operasional sehari-hari.

## BAB II

# STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

### A. Standard Operating Procedure (SOP) / Standar Prosedur Operasional

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis untuk melaksanakan penyelenggaraan aktifitas organisasi yang memuat bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa pekerjaan dilakukan. Tujuan dibuatnya SOP ini antara lain :

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pekerjaan yang dilakukan
2. Kepastian pekerjaan selesai dilaksanakan
3. Akuntabilitas pekerjaan yang dilaksanakan

SOP yang sudah ada di Pengadilan Negeri Blora Kelas II telah mengalami beberapa revisi dan terakhir mengalami revisi pada bulan April 2016 SOP yang telah direvisi ini telah disesuaikan dengan format yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan SEKMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dan disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Blora Kelas II telah menyusun Standar Operasional Prosedur sebanyak 66 SOP. Semua SOP yang telah disusun ini meliputi tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Blora Kelas II dari mulai pimpinan, hakim, pejabat struktural eselon III, dan IV, Pejabat Fungsional Panitera Pengganti sampai kepada staf. Secara garis besar SOP yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Blora terdiri dari :

1	SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2	SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
3	SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
4	SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tipiring
5	SOP Pidana Lalu Lintas
6	SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Bandin
7	SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi
8	SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali
9	SOP Proses Penyelesaian Praperadilan Pidana
10	SOP Proses Penyelesaian Grasi
11	SOP Pidana Ijin Penyitaan
12	SOP Pidana Ijin Penggeledahan
13	SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi
14	SOP Pidana Barang Bukti
15	SOP Pidana Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl. 25

16	SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl. 29
17	SOP Perkara Perdata Gugatan
18	SOP Perkara Perdata Permohonan
19	SOP Panggilan Delegasi
20	SOP Perdata Upaya Hukum Banding
21	SOP Perdata Upaya Hukum Kasasi
22	SOP Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali
23	SOP Perdata Eksekusi
24	SOP Sita Eksekusi Perdata
25	SOP Perkara Perdata Prodeo
26	SOP Gugatan Sederhana
27	SOP Delegasi Elektronik
28	SOP Perdata Upaya Hukum Banding
29	SOP Perdata Upaya Hukum Kasasi
30	SOP Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali
31	SOP Perdata Eksekusi
32	SOP Laporan Perkara
33	SOP Pendaftaran Badan Hukum
34	SOP Pendaftaran Surat Kuasa
35	SOP Pendaftaran Surat Kuasa Isidentil
36	SOP Kerjasama POS Bakum
37	SOP Layanan POS Bakum
38	SOP Pengaduan
39	SOP Surat Keterangan Penelitian
40	SOP Pengarsipan Berkas
41	SOP Permohonan Informasi
42	SOP Surat Keluar
43	SOP Surat Masuk
44	SOP Laporan Perkara
45	SOP Pendaftaran Badan Hukum
46	SOP Pendaftaran Surat Kuasa
47	SOP Bezetting Tenaga Teknis dan Non Teknis
48	SOP Cuti
49	SOP Kenaikan Pangkat
50	SOP Kenaikan Gaji Berkala
52	SOP Usulan Promosi Jabatan
53	SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil
54	SOP Permohonan Cuti
55	SOP Penyelesaian Surat Tugas
56	SOP Pengelolaan Surat Keluar
57	SOP Pengelolaan Surat Masuk
58	SOP Penilaian SKP
59	SOP DUK
60	SOP Pengelolaan Persediaan
61	SOP Pengelolaan SIMAK BMN
62	SOP Laporan SIMAK BMN



63	SOP Informasi Teknologi
64	SOP Laporan Bulanan
65	SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
66	SOP Perencanaan Anggaran

SOP-SOP tersebut merinci tugas masing-masing tingkatan jabatan sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsional

Tugas Fungsional, Eselon III dan Eselon IV dalam SOP merupakan tugas yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon I melalui Surat Keputusan dan Edaran. Melalui kewenangannya Eselon II merupakan decision maker dalam setiap usulan dari pejabat di tingkat bawahnya. Tugas pejabat eselon III juga mengkompilasi tugas yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional.

Secara rinci SOP Fungsional pada Pengadilan Negeri Blora meliputi:

a. Ketua Pengadilan Negeri Blora

1. SOP Penetapan Majelis Hakim
2. SOP Perpanjangan Penahanan 60 Hari
3. SOP Eksekusi Lelang
4. SOP Eksekusi Riil

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora :

1. SOP Ijin Sita dan Penggeledahan
2. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara lalulintas
3. SOP Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan
4. SOP Penetapan Hakim dalam Perkara Tipiring
5. SOP Perpanjangan Penahanan
6. SOP Persetujuan Sita dan Penggeledahan

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora :

1. SOP Majelis Hakim Persidangan Perkara Lalulintas
2. SOP Majelis Hakim Persidangan Perkara Perdata
3. SOP Majelis Hakim Persidangan Perkara Permohonan
4. SOP Majelis Hakim Persidangan Perkara Pidana Biasa
5. SOP Majelis Hakim Persidangan Perkara Tipiring

d. Panitera

1. SOP Panitera Legalisasi Bukti Surat
2. SOP Panitera Pelaksanaan Eksekusi Riil
3. SOP Panitera Penunjukkan Panitera Pengganti Perkara Pidana/ Perdata
4. SOP Panitera Penunjukkan Panitera Pengganti Perkara Tipiring dan Lalulintas

e. Panitera Muda Hukum

1. SOP Laporan Perkara
2. SOP Pendaftaran Badan Hukum
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
4. SOP Pendaftaran Surat Kuasa Isidentil
5. SOP Kerjasama POS Bakum
6. SOP Layanan POS Bakum
7. SOP Pengaduan
8. SOP Surat Keterangan Penelitian
9. SOP Pengarsipan Berkas
10. SOP Permohonan Informasi
11. SOP Surat Keluar
12. SOP Surat Masuk

f. Panitera Muda Pidana

1. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Biasa
2. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak
3. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Singkat
4. SOP Proses Penyelesaian Perkara Pidana Cepat Tipiring
5. SOP Pidana Lalu Lintas
6. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Bandin
7. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi
8. SOP Proses Penyelesaian Upaya Hukum Peninjauan Kembali
9. SOP Proses Penyelesaian Praperadilan Pidana
10. SOP Proses Penyelesaian Grasi
11. SOP Pidana Ijin Penyitaan
12. SOP Pidana Ijin Penggeledahan
13. SOP Proses Penyelesaian Permohonan Diversi
14. SOP Pidana Barang Bukti
15. SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl. 25
16. SOP Penerimaan Permohonan Perpanjangan Penahanan Psl. 29

g. Panitera Muda Perdata

1. SOP Perkara Perdata Gugatan
2. SOP Perkara Perdata Permohonan
3. SOP Panggilan Delegasi
4. SOP Perdata Upaya Hukum Banding
5. SOP Perdata Upaya Hukum Kasasi
6. SOP Perdata Upaya Hukum Peninjauan Kembali
7. SOP Perdata Eksekusi
8. SOP Sita Eksekusi Perdata
9. SOP Perkara Perdata Prodeo
10. SOP Gugatan Sederhana
11. SOP Delegasi Elektronik

h. Panitera pengganti

1. SOP. Penyelesaian perkara Gugatan
2. SOP. Penyelesaian perkara Permohonan
3. SOP. Penyelesaian perkara Pidana Anak
4. SOP. Penyelesaian perkara Pidana Khusus
5. SOP. Penyelesaian Minutasi perkara

i. Jurusita

1. SOP. Prosedur Pemberitahuan Inzage
2. SOP. Prosedur Pemberitahuan Penetapan Isi utusan
3. SOP. Prosedur Pemberitahuan Penyataan Banding, Kasasi, PK.
4. SOP. Prosedur Penyampaian Kotra Memori Banding, Kasasi, PK.
5. SOP. Prosedur Panggilan Sidang.

Secara rinci SOP eselon III dan IV pada Pengadilan Negeri Blora Kelas II meliputi:

a. Sekretaris

1. SOP Laporan Tahunan
2. SOP Baperjakat
3. SOP Cuti
4. SOP Kenaikan Pangkat
5. SOP Penanganan Daftar Hadir
6. SOP Penanganan KGB dan Inpassing
7. SOP Penerbitan Karpeg, Karis, Karsu
8. SOP Penanganan Pelanggaran Disiplin

b. Kasubag Umum dan Keuangan

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Pengadaan Inventaris
4. SOP Pengelolaan Perpustakaan
5. SOP Penyusunan laporan Keuangan
6. SOP Penghapusan BMN
7. SOP Pembuatan Spesimen Tanda Tangan
8. SOP Pembuatan KIPS

9. SOP Pengajuan Uang Persediaan (UP)
10. SOP Pengajuan Gaji Induk
11. SOP Pengajuan Kekurangan Gaji
12. SOP Pengajuan Uang Makan
13. SOP Pengajuan Uang Lembur
14. SOP Pengajuan Belanja Modal
15. SOP Pengajuan Gaji Susulan
16. SOP Pengajuan Remunerasi
17. SOP Pengelolaan PNBPN.

c. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

1. SOP Bezetting Tenaga Teknis dan Non Teknis
2. SOP Cuti
3. SOP Kenaikan Pangkat
4. SOP Kenaikan Gaji Berkala
5. SOP Usulan Promosi Jabatan
6. SOP Usulan Pensiun Hakim dan Pegawai Negeri Sipil
7. SOP Permohonan Cuti
8. SOP Penyelesaian Surat Tugas
9. SOP Pengelolaan Surat Keluar
10. SOP Pengelolaan Surat Masuk
11. SOP Penilaian SKP
12. SOP DUK

d. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

1. SOP Pengelolaan Persediaan
1. SOP Pengelolaan SIMAK BMN
2. SOP Laporan BMN
3. SOP Informasi Teknologi
4. SOP Laporan Bulanan
5. SOP Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
6. SOP Perencanaan Anggaran

➤ **Staf**

Staf merupakan bagian pangkal dan ujung dari rangkaian tugas dalam SOP. Staf bertugas dalam providing data dan distribusi hasil keputusan dari pejabat eselon di atasnya.

1. SOP Meregister Perkara Masuk
2. SOP Meregister Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK, dan Grasi
3. SOP Pemberitahuan Kekurangan Berkas
4. SOP Penerimaan Memori Banding
5. SOP Laporan Keuangan Perkara Pidana dan Perdata
6. SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan
7. SOP Pelayanan Arsip
8. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan perkara Tk I, Banding, Kasasi PK.
9. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Pertama
10. SOP Laporan Tahun
11. SOP Kenaikan Pangkat

12. SOP Penanganan Daftar Hadir
13. SOP Penanganan KGB dan Inpassing
14. SOP usul Pensiun
15. SOP Penanganan Surat Masuk
16. SOP Penanganan Surat Keluar
17. SOP Pengelolaan website
18. SOP Pengelolaan Jaringan
19. SOP Perawatan Sarana Gedung
20. SOP Pemeliharaan Barang pustaka
21. SOP Administrasi Barang Pustaka
22. SOP Penetapan Status Pengguna BMN
23. SOP Penghapusan BMN
24. SOP Akuntansi Persediaan
25. SOP Akuntansi SIMAK
26. SOP Rekonsiliasi dengan akuntansi keuangan
27. SOP Pengelolaan uang muka kerja
28. SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP
29. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai
30. SOP Pelaksanaan Anggaran belanja Modal
31. SOP Pengelolaan Tunjangan Kinerja

## B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Secara keseluruhan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Blora Kelas II berjumlah 43 orang. Adapun rincian beserta uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

### FUNGSIONAL

No.	Eselon III	Jumlah SKP
1	Dju Johnson Mira Mangngi , SH.MH. (Ketua)	9
2	Rudi Fahkrudin Abbas, Sh. (Wakil Ketua)	9
3	Ahmad Zulpikar, SH. (Hakim)	8
4	Awal Darmawan, SH. (Hakim)	8
5	Yunita, SH. (Hakim)	8
6	Morindra Krisna, SH. (Hakim)	8
7	Dwi Ananda Fajarwati, SH. MH. (Hakim)	8
8	Rr. Endang Dewi Nugraheni, SH.MH. (Hakim)	8
9	Yayuk Musyafiah, SH. MH. (Hakim)	8
10	Murtoyo , SH. M.Hum. (Panitera/ Sekretaris)	11
11	Abdul Munif, SH. (Wakil Panitera)	9
12	Sumiyati, SH. (Panitera Pengganti)	17
13	Sumaryatin (Panitera Pengganti)	17
14	Sutikna (Panitera Pengganti)	17
15	Sutartik (Panitera Pengganti)	17
16	Puryanto, SH. (Panitera Pengganti)	17
17	Sulistyo Adi Raharjo (Panitera Pengganti)	17
18	Suparno,SH. (Panitera Pengganti)	17
19	Kristina (Panitera Pengganti)	17
20	Laksita Anggrarini, SH. (Panitera Pengganti)	17
21	Reni Yuliartanti, SH. (Panitera Pengganti)	17

**Eselon III**

No.	Eselon IV	Jumlah SKP
1	Agus Setianto, SH. (Wakil Sekretaris)	10

**Eselon IV**

No.	Eselon V	Jumlah SKP
1	Purwanto (Kasubag. Rentipor)	17
2	Jatman (Plt. Kasubag. Umum dan Keuangan)	18
3	Sri Rukmini Eka Wulan (Kasubag Ortala)	22
4	Didik Riyadi, SH. (Panmud Pidana)	26
5	Satrio Pringgodani, SH. (Panmud Perdata)	28
6	Totok Misdiyanto (Panmud Hukum)	24

**Staf**

No.	Staf	Jumlah SKP
1	Rosana,S.Kom.	18
2	Dimas Arman Aryanto, SE.	17
3	Dani Budi Prasetyo	16
4	Rohop Ogest Sinaga, SH.	8
5	Agus Jasmasi	8

**Jurusita/ Jurusita Pengganti**

No.	Fungsional	Jumlah SKP
1	Winarto	27
2	Suparmin	27
3	Siti Lestari	27
4	Puji Astuti	27
5	Budi Wibawati	27
6	Mundofa	27
7	Agung Nursusanto	27
8	Dedi Suyanta	27
9	Agus Tiyono	25
10	Sunar	23

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

Dalam rangka peningkatan dan efektivitas kinerja aparat Peradilan Agama sudah barang tentu tidak akan terlepas dari unsur pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara berkala dan terstruktur terhadap aparat pelaksana peradilan. Pada tahun anggaran 2016 Pengadilan Negeri Blora Kelas II mempunyai anggaran untuk pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik peningkatan kualitas dibidang kepaniteraan yang bertujuan guna meningkatkan kualitas aparat peradilan dibidang teknis yudisial dan administrasi yudisial maupun peningkatan kualitas dibidang sekretariat. Namun disamping itu harus diperhatikan agar tidak terjadi kejenuhan dalam pelaksanaan kinerja harus diperhatikan adanya pemberian reward kepada aparat peradilan yang dipandang cakap dan mampu menorehkan prestasi, yaitu berupa mutasi, baik berupa usulan promosi maupun penyegaran dalam pelaksanaan tugas dalam bentuk rotasi. Dalam hal pembinaan dan pengelolaan aparat peradilan maupun supporting unit pelaksanaan kinerja akan terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut :

#### A. Kebutuhan Sumber daya manusia.

##### 1. Profil Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada di Pengadilan Negeri Blora Kelas II per 30 Desember 2016 berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang Hakim dan Pegawai , dan 7 (tujuh) orang honorer yaitu sebagai berikut :

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	Dju Johnson Mira Mangngi , SH.MH	Pembina TK.I (IVb)	Ketua
2	Rudi Fahkrudin Abbas, SH.	Pembina TK.I (IVb)	Wakil Ketua
3	Ahmad Zulpikar, SH.	Penata TK. I (III/d)	Hakim
4	Awal Darmawan, SH.	Penata TK. I (III/d)	Hakim
5	Yunita, SH.	Penata TK. I (III/d)	Hakim
6	Morindra Krisna, SH.	Penata TK. I (III/d)	Hakim
7	Dwi Ananda Fajarwati, SH. MH.	Penata TK. I (III/d)	Hakim
8	Rr. Endang Dewi Nugraheni, SH.MH.	Penata TK. I (III/d)	Hakim
9	Yayuk Musyafiah, SH. MH.	Penata (III/c)	Hakim
10	Murtoyo , SH. M.Hum.	Penata TK. I (III/d)	Panitera
11	Abdul Munif, SH.	Penata TK. I (III/d)	Wakil Panitera
12	Agus Setianto, SH.	Penata TK. I (III/d)	Sekretaris
13	Strio Pringgodani, SH	Penata TK. I (III/d)	Panmud Perdata

14	Didik Riyadi, SH.	Penata TK. I (III/d)	Panmud Pidana
15	Sumiyati, SH.	Penata TK. I (III/d)	PP.
16	Puryanto, SH.	Penata TK. I (III/d)	PP.
17	Totok Misdiyanto	Penata (III/c)	Panmud. Hukum
18	Sumaryatin Pengganti)	Penata TK. I (III/c)	PP.
19	Sutikna	Penata TK. I (III/c)	PP.
20	Sutartik	Penata TK. I (III/c)	PP.
21	Sulistyo Adi Raharjo	Penata TK. I (III/c)	PP.
22	Suparno,SH	Penata TK. I (III/c)	PP.
23	Kristina	Penata TK. I (III/c)	PP.
24	Laksita Anggrarini, SH.	Penata Md. TK. I (III/b)	PP.
25	Reni Yuliartanti, SH.	Penata Md. TK. I (III/b)	PP.
26	Purwanto	Penata TK. I (III/c)	Kasubag. Rentipor
27	Sri Rukmini Eka Wulan	Penata TK. I (III/c)	Kasubag. Ortala
28	Jatman	Penata Md. TK. I (III/b)	Plt. Kasubag. Umum dan Keu.
29	Winarto	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita
30	Suparmin	Pengatur (II/c)	Jurusita
31	Siti Lestari	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita Pengganti
32	Puji Astuti	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita Pengganti
33	Budi Wibawati	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita Pengganti
34	Mundofa	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita Pengganti
35	Agung Nursusanto	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita Pengganti
36	Dedi Suyanta	Penata Md. TK. I (III/b)	Jurusita Pengganti
37	Agus Tiyono	Pengatur (II/c)	Jurusita Pengganti



38	Sunar	Pengatur Md. (II/a)	Jurusita Pengganti
39	Rosana,S.Kom.	Penata TK. I (III/c)	Staf Rentipor
40	Dimas Arman Aryanto, SE.	Penata TK. I (III/c)	Staf Umum & Keu.
41	Dani Budi Prasetyo	Pengatur (II/c)	Staf Perdata
42	Rohop Ogest Sinaga, SH.	Penata (III/a)	Staf Rentipor
43	Agus Jasmasi	Pengatur (II/b)	Staf Ortala.
44	Zaenudin	-	Honorar/ Satpam
45	Suwono	-	Honorar/ Sopir
46	Edy Sulistiyono	-	Honorar/ Satpam
47	Anton Aprilono	-	Honorar/Pramubh akti
48	Selamet	-	Honorar/Pramubh akti
49	Mira Triana Dewi	-	Honorar/Pramubh akti
50	Agus Supriyono	-	Honorar/Pramubh akti

## 2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Sebuah organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok dan perkembangan jaman. Dengan semakin majunya teknologi dan pengetahuan masyarakat akan hukum, jumlah perkara yang masuk terus saja mengalami peningkatan oleh karena itu perlu adanya analisa kebutuhan sumber daya manusia sebagai berikut :

Jabatan	Jumlah Saat Ini	Jumlah Ideal	Kekurangan
Ketua	1	1	-
Wakil Ketua	1	1	-
Hakim	7	9	2
Panitera	1	1	-
Wakil Panitera	1	1	-
Sekretaris	1	1	-
Panitera Muda	3	3	-
Kasubagian	3	2	1
Panitera Pengganti	10	12	2
Jurusita	2	3	1
Jurusita Pengganti	10	10	-
Pranata Komputer	1	2	1
Pustakawan	-	1	1
Arsiparis	-	1	1
Staf/ Tenaga Administrasi	5	8	3
<b>Kekurangan Pegawai</b>			<b>12</b>

## 3. Mutasi

Adapun mutasi pegawai maupun Hakim pada Pengadilan Negeri Blora Kelas II dari tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Desember 2016 ditunjukkan pada tabel berikut :

### ➤ Mutasi Hakim

No.	N a m a	Satker Lama	Satker Baru
1	Ahmad Zulpikar, SH.	Hakim PN Blora	Hakim PN. Jember
2	Awal Darmawan Akhmad, SH	Hakim PN Blora	Hakim PN Tasikmalaya

### ➤ Mutasi Pegawai

No.	N a m a	Satker Lama	Satker Baru
1	Nihil	-	-

#### 4. Promosi

Selama tahun 2016 ada beberapa Hakim dan pegawai yang mendapatkan promosi jabatan, yaitu.

No.	N a m a	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Rudi Fahkrudin Abbas, SH	Wakil Ketua	Ketua Temanggung
2	Dju Johnson Mira Mangngi , SH.MH	Ketua	Hakim PN. Jakarta Utara.

#### 5. Pensiun/ Meninggal

Selama tahun 2016 ada beberapa Hakim dan pegawai yang pensiun/ meninggal dunia jabatan, yaitu.

No.	N a m a	Jabatan	Keterangan
1	Mulsidi	Kasubag. Umum dan Keuangan	Pensiun 01-02-2016
2	Munaji	Panitera Pengganti	Pensiun 01-01-2016.
3	Hartanto Sarno Saputro,SH.	Panitera Pengganti	Pensiun 01-06-2016.
4	Edi Susanto	Panitera Pengganti	Meninggal

### B. Keadaan perkara

#### 1. Rekapitulai Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Blora Tahun 2016

Keadaan perkara masuk baik perkara Pidana maupun perkara Perdata di Pengadilan Negeri Blora Kelas II selama tahun 2016 sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Perkara.

Rekapitulasi Keadaan perkara Tahun 2016 sebagai berikut :  
Perkara Pidana Dalam Tahun 2016

Jenis Perkara	Sisa Perkara	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara diminutasi	Perkara minutasi yang dipublikasikan	Sisa Perkara belum putus
Pidana Biasa	18	226	223	223	223	21
Pidana Khusus	2	8	10	10	10	0
Pidana Tipiring	0	6	6	6	6	0
Pidana Cepat/ Lalu Lintas	0	18.885	18.885	18.885	18.885	0
<b>Jumlah</b>	20	19.125	19.125	19.125	19.125	21

Rekapitulasi Rasio Perkara Pidana Tahun 2016  
Terhadap Majelis Per Bulan

No.	Bulan	Perkara			Rasio Perkara Terhadap Majelis			Ket.
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Majelis Hakim		
						Jumlah	*Kinerja %	
1	Januari	21	2137	2135	23	9	8,35	
2	Pebruari	23	1405	1401	27	9	4,67	
3	Maret	27	984	983	28	9	3,16	
4	April	28	1423	1422	29	9	4,41	
5	Mei	29	2254	2243	40	9	5,05	
6	Juni	40	1083	1097	26	9	3,80	
7	Juli	26	633	618	41	9	1,36	
8	Agustus	41	960	972	29	9	3,02	
9	September	29	943	943	29	9	2,93	
10	Oktober	29	1066	1057	38	9	2,50	
11	Nopember	38	583	582	39	9	1,34	
12	Desember	39	9	13	35	9	0,03	
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>13480</b>	<b>13466</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>3,16</b>	

**Putusan yang diajukan Banding :**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora yang mengajukan Banding sebanyak 22 (dua puluh dua) perkara, diputus sebanyak 18 (delapan belas) Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding sebanyak 18 (delapan belas) Perkara
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding sebanyak 1 (satu) Perkara.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang tidak dapat diterima Tk. Banding sebanyak 0 (nol) Perkara

**4. Putusan yang diajukan Kasasi :**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Kelas II yang mengajukan Kasasi sebanyak 12 (dua belas) perkara, diputus sebanyak 3 (tiga) Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi sebanyak 3 (*tiga*) Perkara.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi sebanyak (*Nol*) Perkara
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi sebanyak (*Nol*) Perkara.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi sebanyak (*Nol*) Perkara
- e. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan dibatalkan Tk. Kasasi sebanyak (*Nol*) Perkara.

**5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 0 (nol) perkara, diputus sebanyak 0 (*Nol*) Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (*Nol*) Perkara.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (*Nol*) Perkara
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (*Nol*) Perkara.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (*Nol*) Perkara
- e. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (*nol*) Perkara
- f. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (*Nol*) Perkara.

- g. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- h. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- i. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- j. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- k. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- n. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- p. Putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- q. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara

### Rekapitulasi Perkara Perdata Dalam Tahun 2016

Jenis Perkara	Sisa Perkara tahun yang lalu	Perkara Masuk	Perkara Putus	Perkara diminutasi	Perkara minutasi yang dipublikasikan	Sisa Perkara belum putus
Perdata Gugatan	10	34	39	39	39	5
Perdata Permohonan	2	260	262	262	262	0
Gugatan Sederhana	0	9	8	8	8	1
<b>Jumlah</b>	12	303	309	309	309	6

## Rekapitulasi Rasio Perkara Perdata Terhadap Majelis Per Bulan 2016

No.	Bulan	Perkara				Rasio Perkara Terhadap Majelis		Ket.
		Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir	Hakim		
						Jumlah	*Kinerja %	
1	Januari	12	23	17	18	9	0,09	
2	Pebruari	18	29	25	22	9	0,10	
3	Maret	22	20	27	15	9	0,16	
4	April	15	18	14	19	9	0,07	
5	Mei	19	16	18	17	9	0,10	
6	Juni	17	35	34	18	9	0,17	
7	Juli	18	15	20	13	9	0,14	
8	Agustus	13	30	23	20	9	0,10	
9	September	20	32	45	7	9	0,58	
10	Oktober	7	39	32	14	9	0,21	
11	Nopember	14	33	26	21	9	0,11	
12	Desember	21	14	26	9	9	0,26	
Total		9	<b>304</b>	<b>307</b>	9	<b>9</b>	0,14	

### 2. Rasio Perkara Terhadap Majelis

Dari jumlah perkara Pidana dan Perdata sebanyak 13.784 perkara yang diputus Majelis Hakim sebanyak 13.772 Perkara (99,91% ), capaian rasio perkara terhadap majelis rata-rata 28,17 % dari jumlah 9 Hakim selama tahun 2016.

### 3. Putusan yang diajukan Banding :

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora yang mengajukan Banding sebanyak 32 (tiga puluh dua) perkara, diputus sebanyak 16 (enam belas) Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding sebanyak 15 (Lima belas) Perkara
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding sebanyak 2 (dua) Perkara.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang tidak dapat diterima Tk. Banding sebanyak 0 (nol) Perkara

**4. Putusan yang diajukan Kasasi :**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora Kelas II yang mengajukan Kasasi sebanyak 0 (Nol) perkara, diputus sebanyak ... (Nol) Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi sebanyak (Nol) Perkara.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi sebanyak (Nol) Perkara
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi sebanyak (Nol) Perkara.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi sebanyak (Nol) Perkara
- e. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan dibatalkan Tk. Kasasi sebanyak (Nol) Perkara.

**5. Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK) :**

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blora yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebanyak 1 (satu) perkara, diputus sebanyak 0 (Nol) Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- c. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- e. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK sebanyak 1 (satu) Perkara
- f. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- h. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dikuatkan Tk. Banding dan tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- i. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- j. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang dibatalkan Tk. Banding dan dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara



- k. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dikuatkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- n. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- p. Putusan Tk. Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dibatalkan Tk. PK sebanyak 0 (Nol) Perkara
- q. Putusan Pengadilan Negeri Blora yang Berkekuatan Hukum Tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara
- r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang Berkekuatan Hukum Tetap tidak dapat diterima Tk. PK. sebanyak 0 (Nol) Perkara

### C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

#### 1. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung.

Sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Negeri Blora Kelas II belum memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung RI, maka sudah barang tentu sarana dan prasarana fasilitas gedung juga belum sesuai dengan standar Mahkamah Agung RI, yang berdiri tahun 1983 ± direnovasi sebagian pada tahun 2009, dan pada tahun anggaran 2017 mengusulkan renovasi Gedung kantor karena gedung tersebut belum prototipe namun belum dikabulkan.

#### 2. Pengelolaan Teknologi Informasi.

Teknologi Informasi ( TI ), adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data baik berupa teks maupun numeric.

TI adalah bidang yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Singkatnya, apa yang membuat data, informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun, melalui setiap mekanisme distribusi multimedia, dianggap bagian dari TI. TI menyediakan pelayanan keterbukaan informasi pada pencari keadilan yang ingin mengakses perkara di tingkat pertama, banding, kasasi, dan PK.

TI melakukan berbagai fungsi (TI Disiplin/Kompetensi) dari meng-instal Aplikasi untuk merancang jaringan komputer dan Database informasi. Beberapa tugas yang TI lakukan mungkin termasuk manajemen data, jaringan, rekayasa perangkat keras komputer, database dan desain perangkat lunak, serta manajemen dan administrasi sistem secara keseluruhan.

Era sarana dan prasarana kinerja manual kini telah bergeser ke juga sarana kerja elektrik, sehingga institusi manapun yang menguasai teknologi informasi akan sangat berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi kinerja dan outcomes kinerja akan lebih terukur. Pengadilan Negeri Blora Kelas II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga tidak terlepas dari teknologi informasi, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.

a. Perangkat Keras.

Perangkat Keras Teknologi Informasi (Hardware) merupakan semua bagian yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam bentuk fisik. Pengadilan Negeri Blora dalam rangka melaksanakan tugas agar efektif dan efisien telah menyiapkan sarana dan prasarana kinerja teknologi informasi berupa perangkat keras sebagai berikut :

- PC Unit

Jumlah : 24 unit dalam keadaan baik 21 unit dan dalam keadaan rusak berat 3 unit, yang tersebar pada ruangan , Pansek, Wakil Ketua, Kepegawian, Umum, Keuangan, Panmud Pidana, Panmud Perdata, Panmud Hukum dan Hakim.

Penggunaan : Sebagai alat bantu pelaksanaan tupoksi baik dalam perencanaan, monitoring, analisa dan pelaporan dalam bentuk naskah, spreadsheet maupun grafik. Selain digunakan sebagai unit penunjang unit IT yang lain seperti fingerprint, jaringan, server dll.

- LAP-TOP

Jumlah : 8 unit dalam keadaan baik 6, dan 2 rusak berat, yang digunakan pejabat dan staf sesuai dengan SK Penanggung Jawab / SK Penunjukan.

Penggunaan : Sebagai alat bantu pelaksanaan tupoksi dilapangan baik dalam pelaksanaan kegiatan workshop, orientasi, konsultasi, rekonsiliasi, pengawasan dan kegiatan luar kantor lainnya.

- Jaringan

Jumlah : 1 paket jaringan yang terdiri dari jaringan kabel (LAN) dan birkabel (wifi).

Penggunaan : Sebagai saluran pertukaran data dari berbagai device IT yang dapat mengaksesnya. Jaringan diaplikasikan untuk dapatmengkoneksikan jaringan inter dan intranet. Setiap PC, fotokopi dan fingerprint terkoneksi melalui jaringan kabel (LAN) sedangkan untuk Laptop,HP dll dikoneksikan jaringan nirkabel (wifi).

- Server

Jumlah : 2 buah yang berada di ruang server.

Penggunaan : Digunakan sebagai penyimpanan data (storage) , pembawa portal internet, email intranet dan router jaringan internet.

- Fingerprint.  
Jumlah : 1 buah ditempatkan di ruang piket,  
Penggunaan : Digunakan sebagai alat absensi para pegawai.

b. Perangkat Lunak

Perangkat Lunak (software) adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah, maupun dokumen serta arsip lainnya.

Perangkat Lunak (software) merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri, data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalkannya.

Untuk mencapai keinginannya tersebut dirancanglah suatu susunan logika, logika yang disusun ini diolah melalui perangkat lunak, yang disebut juga dengan program beserta data-data yang diolahnya. Pengolahan pada software ini melibatkan beberapa hal, diantaranya adalah sistem operasi program, dan data. *Software* ini mengatur sedemikian rupa sehingga logika yang ada dapat dimengerti oleh mesin komputer.

Dalam rangka guna memudahkan kinerja Pengadilan Negeri Blora juga membekali diri dengan sistem operasi yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer agar saling terhubung satu sama lainnya, perangkat lunak yang ada pada Pengadilan Negeri Blora adalah sebagai berikut :

Software

- Pengadilan Negeri Blora

Website : <http://www.pn-blora.go.id/main/>

Penggunaan : sebagai sarana komunikasi dan transparansi Pengadilan kepada masyarakat.

Penggunaan : sebagai sarana komunikasi berbagai macam hal tupoksi antar pemegang kepentingan berbagai operator aplikasi di Pengadilan di Jawa .

Portal Intranet

Penggunaan : sebagai portal web intranet untuk mengkomunikasikan keadaan kantor secara statistik maupun situasional.

## D. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Bidang Keuangan Pengadilan Negeri Blora adalah pengelolaan keuangan DIPA Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

1. DIPA 01 (BUA ) sebesar Rp. 5.191.526.000,00
  2. DIPA 03 (BADILUM) sebesar Rp. 74.656.000,00
- Jumlah ..... Rp. 5.266.182.000,00
- masing-masing Program sebagai berikut :

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program ini meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional setelah revisi sebesar Rp. 5.191.526.000,00 (lima milyar seratus lima juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), terealisasi Rp. 5.040.249.143,00 atau 98,74 %.

### 2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini meliputi Belanja Modal setelah revisi sebesar Rp. 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), terealisasi Rp. 85.900.000,00 atau 99,88%

#### Rekapitulasi DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MA-RI)

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	4.471.680.000	4.406.762.448	98,55%	70.137467
2	Belanja Barang Operasional	539.666.000	539.338.778	99,94%	327.222
3	Belanja Barang Non Operasional	94.180.000	94.147.917	99,97%	32.083
4	Belanja Modal	86.000.000	85.900.000	99,88 %	100.000
<b>Jumlah</b>		<b>5.191.526.000</b>	<b>5.126.149.143</b>	<b>98,74%</b>	<b>70.596.772</b>

### 3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Anggara Program tersebut dimanfaatkan untuk Pos Pelayanan bantuan Hukum (POSBAKUM), Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi masyarakat miskin, Penyelesaian Administrasi Perkara, dan Keamanan Sidang sebesar Rp. 74.656.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) terealisasi Rp. 72.494.900,00 atau 97,01 %.

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
1	Pos Pelayanan Hukum	37.000.000	36.991.900	99,98	8.100
2	Penyelesaian Administrasi Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	35.471.000	35.433.000	99,89	38.000
3	Pemanfaatan Fungsi Ziting Plaatz/ Sidang diluar Pengadilan dan Prodeo	2.185.000	0	0	2.185.000
<b>Jumlah</b>		<b>74.656.000</b>	<b>72.494.900</b>	<b>97.01</b>	<b>2.231.100</b>

#### E. Dukungan Teknologi Informasi

Adanya pemasangan serwer dan aiti, hal tersebut mampu mengatasi permasalahan nyata dimasyarakat secara inovatif, dengan dasar keilmuan terkini dan teruji terutama dalam :

1. Memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan sistem informasi dan tehnologi, informasi dalam suatu organisasi melalui pendekatan inter disiplinier dan multi disiplinier.
2. Merencanakan, menerapkan dan mengelola sistem informasi dan tehnologi informasi dalam tingkatan operasional, manajerial maupun strategis.
3. Melakukan dan mengelola riset pengembangan sistem informasi dan tehnologi informasi yang inovatif dan teruji dalam suatu organisasi

Adapun alamat website dan email Pengadilan Negeri Blora Kelas II dapat dilihat pada tabel di bawah:

NO.	ALAMAT WEBSITE	ALAMAT EMAIL
1	<a href="http://www.pn-blora.go.id/main/">http://www.pn-blora.go.id/main/</a>	<a href="mailto:pnblora@yahoo.co.id">pnblora@yahoo.co.id</a> <a href="mailto:keu_pnbla@yahoo.co.id">keu_pnbla@yahoo.co.id</a> <a href="mailto:Keupnbla14@gmail.com">Keupnbla14@gmail.com</a>

## F. Regulasi Tahun 2016

Berikut adalah daftar regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blora Kelas II selama tahun 2016.

No.	Nomor Regulasi	Perihal	Keterangan
1	W12.U15/215/KP.01.3/03/2016 01-03-2016	Ketentuan Peningkatan Penegakan Disiplin Kerja Bagi Hakim, Pejabat dan Staf Pengadilan Negeri Blora.	1. Absensi fingerscan. 2. Rekonsiliasi data SAKPA – SIMAK BMN. 3. Monitoring data SIMPEG 4. Ketentuan pakaian dinas. 5. Pelayanan publik. 6. Tindakan terhadap Pelanggaran
2	W12.U15/49/KP.01.3/07/2016 01-07-2016	Ketentuan Pemberian Ijin Cuti Sakit	Pegawai Negeri Sipil yang berhak mengajukan cuti sakit beserta ketentuan melampirkan surat keterangan dokter
3	W12.U15/575/KP.01.3/08/2016 01-08-2016	Ketentuan Peningkatan Penegakan Disiplin Kerja Bagi Hakim, Pejabat dan Staf Pengadilan Negeri Blora.	1. Disiplin jam kerja, dan tertib bekerja. 2. Apel Senin pagi dan Jumat Sore 3. Monitoring aplikasi SIMPEG. 4. Pelayanan publik. 5. Tindakan pelanggaran
4	W12.U15/698/KP.01.3/10/2016 01-10-2016	Ketentuan Peningkatan Penegakan Disiplin Kerja Bagi Hakim, Pejabat dan Staf Pengadilan Negeri Blora	1. Pengisian aplikasi E-PUPNS. 2. Pengisian LHKPN. 3. Tindakan pelanggaran 4. Pelayanan Publik.
5	W12.U15/00/MM/02/2016 25-02-2016	Manual Mutu	Sistem manajemen mutu

## BAB IV

# PENGAWASAN

Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Blora Kelas II merupakan quality control atas effort aparat Pengadilan Negeri Blora Kelas II yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh aparat Pengadilan adalah produk yang benar-benar akurat, akuntabel dan efisien. Selain kualitas produk hukum, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juga bertanggung jawab atas kualitas aparatnya. Beberapa kegiatan pengawasan yang telah dilakukan tergambar dalam ulasan berikut :

### A. Internal

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 24 Agustus 2006 nomer : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dilingkungan Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Negeri Blora telah melaksanakan Pengawasan Internal yang mana dalam pengawasan ditunjuk para Hakim sebagai Hakim Pengawas Bidang untuk membantu tugas Ketua Pengadilan Negeri Blora dan sebagai koordinator adalah Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora dan pada setiap bulannya Pengadilan Negeri Blora telah mengadakan rapat bulanan yang bertujuan untuk membahas sejauh mana kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan staf Pengadilan Negeri Blora, dan apa pula hambatannya demikian juga cara mengatasinya yang dalam hal ini masing – masing Hakim Pengawas Bidang telah melaporkan tentang bidang yang diawasinya meliputi :

1. Manajemen peradilan meliputi :  
Program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, pengawasan dan pembinaan , kendala dan Hambatan, Faktor – faktor yang mendukung dan evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara meliputi :  
Pola prosedur penerimaan perkara, Pola register perkara, Pola Keuangan Perkara, Pola pelaporan perkara, dan pola Kearsipan perkara.

3. Teknis persidangan meliputi :  
Bedah berkas perkara, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, Minutasi perkara .
4. Pelayanan Publik meliputi :  
Pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, Pembinaan dan pengembangan SDM, Pemeliharaan/ perawatan inventaris , Tingkat ketertiban , kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian serta Tingkat pengaduan masyarakat.

Pengawasan Bidang realisasi anggaran dilakukan secara berkala dalam bentuk rapat Koordinasi/evaluasi pelaksanaan anggaran yang diikuti oleh Ketua, Panitera, Wakil Panitera, Sekretaris, serta Kasubagian Umum dan Keuangan dan Bendahara Pengadilan Negeri Blora Kelas II.

Substansi rapat koordinasi/evaluasi meliputi laporan realisasi anggaran, evaluasi pelaksanaan belanja modal baik dari segi kualitas maupun ketepatan waktu pelaksanaan, evaluasi dokumen pendukung pelaksanaan anggaran dan kendala yang ada dilanjutkan dengan solusi dan petunjuk teknis.

## B. Evaluasi

Dari seluruh pengawasan internal yang telah dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blora menggunakan kontrol dengan bantuan Teknologi Informasi. Portal atau tools yang digunakan untuk melakukan evaluasi seperti terlihat dalam tabel berikut :

No.	Obyek Pengawasan	Portal/ Tools	Time Sequence
1	Data perkara Pengadilan Negeri Blora Kelas II	CTS/SIP/Buku Register	Setiap Bulan
2	Data keuangan perkara Pengadilan Negeri Blora	<a href="http://komdanas.mahkamahagung.go.id">http://komdanas.mahkamahagung.go.id</a> dan Buku Keuangan Perkara	Setiap Hari
3	Data Realisasi Anggaran	<a href="http://komdanas.mahkamahagung.go.id">http://komdanas.mahkamahagung.go.id</a>	Setiap Bulan
4	Data Rekonsiliasi Barang dan Anggaran	<a href="http://komdanas.mahkamahagung.go.id">http://komdanas.mahkamahagung.go.id</a>	Setiap Bulan
5	Data Perkara Banding	CTS/SIP	Setiap Bulan
6	Data Absensi	<a href="http://komdanas.mahkamahagung.go.id">http://komdanas.mahkamahagung.go.id</a>	Setiap Hari
7	Data Putusan teranonimasi	CTS/SIP	Setiap Hari



# BAB V

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. KESIMPULAN

1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Blora Kelas II dan sudah berjalan dengan baik.
2. Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Blora Kelas II mencapai target 91 % perkara dari jumlah perkara yang diterima pada tahun berjalan sehingga target sisa perkara pada ahir tahun maksimal 9 % belum terpenuhi.
3. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala.
4. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik.
5. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan dengan baik meskipun belum sempurna.
6. Pengadilan Negeri Blora Kelas II sangat kekurangan pegawai, terutama untuk staf sekretariat. Sehingga staf sekretariat dirangkap sebagai tenaga teknis. Sedang bagian kepaniteraan masih dibutuhkan penambahan Jurusita, dan Panitera Pengganti, mengingat semakin bertambahnya volume perkara yang diterima dan adanya Panitera Pengganti yang pensiun sehingga menjadikan tugas kepaniteraan lebih berat.
7. Kantor Pengadilan Negeri Blora Kelas II yang belum memenuhi standar prototipe Mahkamah Agung sehingga pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan kurang optimal.
8. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil Pengadilan Negeri Blora Kelas II sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat.

## B. REKOMENDASI

1. Agar kedepan mohon diupayakan penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Blora Kelas II mengingat volume penambahan pegawai sekarang tidak seimbang dengan volume pegawai yang pensiun.
2. Agar mendapat perhatian untuk Pengadilan Negeri Blora Kelas II yang bangunan gedungnya belum sesuai standar prototipe Mahkamah Agung.
3. Agar ke depan belanja untuk kebutuhan operasional perkantoran bisa dinaikkan sesuai dengan kebutuhan riil operasional perkantoran.
4. Kedepan agar ada kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal sehingga penyelesaian perencanaan pembangunan gedung sesuai prototipe Pengadilan Negeri Blora Kelas II beserta sarana kelengkapan gedung dapat selesai pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan target yang ada dalam renstra Pengadilan Negeri Blora tahun 2015 – 2019.
5. Agar dilakukan koordinasi dan pembinaan secara intensif kepada unsur Pimpinan dan Kepaniteraan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sampai 99 % perkara yang diterima pada tahun berjalan.
6. Agar dilakukan secara berkala pembinaan dan pelatihan kepada seluruh aparatur Peradilan baik yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi maupun etika pegawai guna mewujudkan aparat aparatur Peradilan profesional, berwawasan luas, terampil dalam menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia.

## C. PENUTUP

Demikian Laporan tahunan tahun 2016 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Blora selama tahun 2016. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Negeri Blora Kelas II kepada publik.

Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Negeri Blora Kelas II, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan tahunan 2016 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.